

No. Katalog : 9302020.15

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI MENURUT PENGELUARAN



**2018 -
2022**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**



**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAMBI
MENURUT PENGELUARAN**



**2018 -
2022**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

No. ISSN : 2301-4466
No. Publikasi : 15000.2309
No Katalog : 9302020.15
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 80 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Desain Kover :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Dicetak Oleh :
CV. Salim Media Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

<https://jambi.bps.go.id>



TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

Pengarah:
Agus Sudibyo, M.Stat.

Penanggung Jawab Umum:
Sumarmi, S.ST., M.Si.

Penyunting Naskah:
Nor Indah Fitriya Ningrum, S.ST., M.Stat.

Pemeriksa Tabel dan Gambar :
Nor Indah Fitriya Ningrum, S.ST., M.Stat.

Penulis:
Lisa Gusmanita, S.ST., M.E.

Desain/Layout:
Oeliestina, S.ST.

Desain Kover:
Ridza Whidyaningrum Ariputri, S.Si.

Infografis:
Ridza Whidyaningrum Ariputri, S.Si.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Jambi, 5 April 2023
BPS Provinsi Jambi
K e p a l a



Agus Sudiby, M.Stat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	17
2.5 Perubahan Inventori.....	22
2.6 Ekspor Impor	25
BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jambi Menurut Pengeluaran.....	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	36
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	42
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	43
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	47
3.7 Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi.....	49
3.8 Perkembangan Impor Provinsi Jambi	51
BAB 4 PERKEMBANGAN PDRB	55
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal).....	55
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	56
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.....	57
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	58
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	58
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor.....	59
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	60
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Balance of Trade</i>).....	62
4.9 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	63
BAB 5 KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	31
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	32
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	34
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	35
Tabel 3.5	Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	36
Tabel 3.6	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018-2022	37
Tabel 3.7	Struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	39
Tabel 3.8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	40
Tabel 3.9	Pertumbuhan Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	41
Tabel 3.10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jambi, 2018-2022	42
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2018-2022	43
Tabel 3.12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen).....	45
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2018-2022.....	46
Tabel 3.14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2018-2022	48
Tabel 3.15	Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi, 2018-2022	49
Tabel 3.16	Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2018-2022.....	51

LANJUTAN DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jambi, 2018-2022	55
Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2018-2022	56
Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jambi, 2018-2022	57
Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jambi, 2018-2022	58
Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2018-2022	59
Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jambi, 2018-2022	60
Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jambi, 2018-2022	61
Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Provinsi Jambi, 2018-2022.....	62
Tabel 4.9 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Jambi, 2018-2022.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi 2018-2022 (Miliar Rupiah)..... 33

<https://jambi.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

Apa itu PDRB?

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penghitungan PDRB

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

- A. Menurut Pendekatan Produksi
- B. Menurut Pendekatan Pendapatan
- C. Menurut Pendekatan Pengeluaran

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

A. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

B. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

C. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah.
4. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Komponen Penyusun PDRB Menurut Pengeluaran



**Pengeluaran
Akhir Konsumsi
LNPRT**

**Pengeluaran
Akhir Konsumsi
Rumah Tangga**



**Pembentukan
Modal Tetap
Bruto**



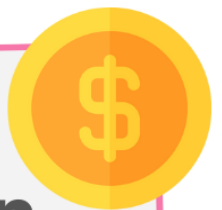
**Pengeluaran
Akhir Konsumsi
Pemerintah**



**Ekspor dan
Impor Barang
dan Jasa**



**Perubahan
Inventori**



BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3 Cakupan

Komponen PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol.
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik.
3. Pakaian dan alas kaki.
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya.
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin.
6. Kesehatan.
7. Angkutan.
8. Komunikasi.
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan.
10. Pendidikan.
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel.
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*), nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan komponen PKRT, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

2.1.4. Penghitungan PKRT Tahunan

A. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- c. Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu.
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

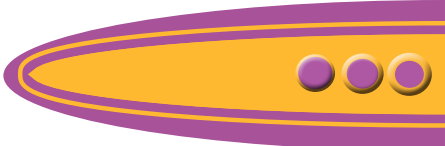
B. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (diluar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

- 
- b. Terhadap data poin kesatu dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu.
 - c. Data poin kedua dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP.
 - d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*.
 - e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP.
 - f. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2 Konsep dan Definisi

Sektor LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- Lembaga ini umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

Sektor LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. Jenis LNPRT dibedakan menjadi tujuh, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PKLNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4 Penghitungan PKLNPRT Tahunan

A. Sumber data

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non profit (SKLNP); informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil *updating* direktori LNPRT; informasi yang diperoleh dari hasil pemutakhiran direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK).

B. Metode Penghitungan

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{X_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

X_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan diatas akan diperoleh besarnya PKLNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKLNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Pada sistem perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa, contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditas (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) provinsi mencakup : a. pengeluaran konsumsi pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi; b. pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi yang bersangkutan; c. pengeluaran konsumsi pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi; d. pengeluaran konsumsi pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

2.3.4 Penghitungan PDRB Tahunan

A. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP provinsi tahunan adalah:

- Data realisasi APBN tahunan Kementerian Keuangan.
- Data realisasi APBD tahunan Kementerian Keuangan.
- Statistik Keuangan Daerah (BPS).
- Output Bank Indonesia (BI).
- Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta indeks harga dari BPS.

B. Metode Penghitungan

1. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah provinsi atas dasar harga berlaku, secara umum dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP atas dasar harga berlaku} = \text{output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PKP provinsi atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3 Cakupan

Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya.
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Penghitungan PMTB Tahunan

A. Sumber Data

Sumber data untuk penghitungan PMTB Tahunan yaitu:

2. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
3. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
4. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
5. Laporan keuangan perusahaan.
6. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
7. Indeks Harga Perdagangan Besar dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
8. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
9. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
10. Publikasi Statistik Konstruksi.
11. Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
12. Statistik Peternakan dari Ditjen Peternakan.

B. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Metode Penghitungan PMTB dengan Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian dimana sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

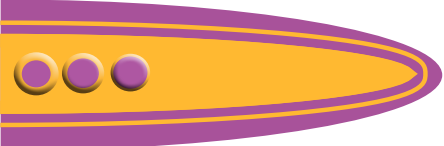
Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di-deflate (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Metode Penghitungan PMTB dengan Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-deflate PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-reflate (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.



Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Yang pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan SKK Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*trade and transport margin*) sulit diperoleh.

- Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1 Pendahuluan

Perekonomian juga memiliki aktivitas berupa inventori. Inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal.

Komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto di dalam PDRB, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku).

Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (material dan supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Metode Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

A. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih; dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan ternak dari Ditjenak Kementan.

B. Metode Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
- b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
- c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflasi perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

- a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan yang dihadapi dalam menghitung komponen perubahan inventori:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2 Konsep dan Definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3 Cakupan

Ekspor impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut.
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut.

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

2.6.4 Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

A. Sumber Data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

B. Metode Penghitungan

Ekspor impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (FOB) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen.

<https://jambi.bps.go.id>

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

20 PDRB ADHB
207 878,69

18 PDRB ADHK
142 902,00

20* PDRB ADHB
232 064,12

21 PDRB ADHK
153 825,49

20 PDRB ADHB
216 927,71

19 PDRB ADHK
149 111,09

20** PDRB ADHB
276 316,37

22 PDRB ADHK
161 717,68

20 PDRB ADHB
205 081,99

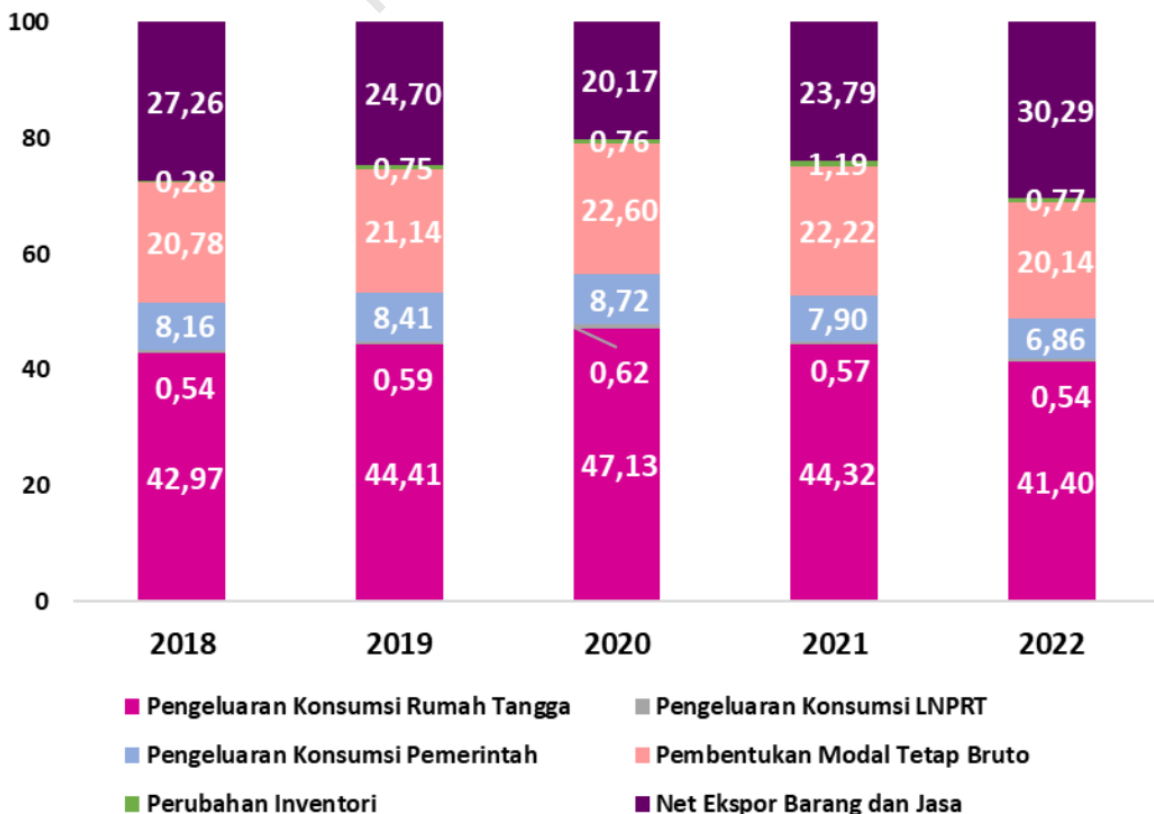
20 PDRB ADHK
148 354,25

PDRB ADHK dan ADHB
dalam Miliar Rupiah

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi, 2018 - 2022 (Persen)



BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jambi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018 sampai dengan 2022, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021), dan struktur perdagangan global yang salah satunya disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina (sejak 24 Februari 2022).

Secara internal maka dapat diamati bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Jambi digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan secara deskriptif pada bab 3 dan 4.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAMBI MENURUT PENGELUARAN

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	89 324,49	96 343,53	96 651,04	102 858,40	114 393,37
2. Konsumsi LNPRT	1 124,74	1 270,94	1 274,91	1 330,25	1 490,60
3. Konsumsi Pemerintah	16 968,27	18 246,78	17 878,52	18 332,42	18 953,03
4. PMTB	43 204,87	45 855,12	46 354,76	51 559,91	55 636,55
5. Perubahan Inventori	583,48	1 627,91	1 553,19	2 759,71	2 139,07
6. Ekspor	154 755,93	158 700,84	135 816,76	153 928,09	187 805,73
7. Impor	98 083,09	105 117,41	94 447,18	98 704,67	104 101,98
Total PDRB	207 878,69	216 927,71	205 081,99	232 064,12	276 316,37

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2022 relatif lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (2010=100) pada tahun 2022 yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	62 685,31	65 279,81	64 991,05	67 206,01	70 205,87
2. Konsumsi LNPRT	785,47	845,22	838,90	855,19	906,94
3. Konsumsi Pemerintah	10 742,18	11 556,81	10 950,82	10 954,81	11 121,82
4. PMTB	30 777,99	31 894,30	32 226,99	35 215,52	36 054,53
5. Perubahan Inventori	399,69	1 177,08	814,98	1 720,56	1 286,55
6. Ekspor	108 691,61	112 297,08	101 607,31	106 328,78	110 868,20
7. Impor	71 180,25	73 939,21	63 075,80	68 455,37	68 726,23
Total PDRB	142 902,00	149 111,09	148 354,25	153 825,49	161 717,68

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

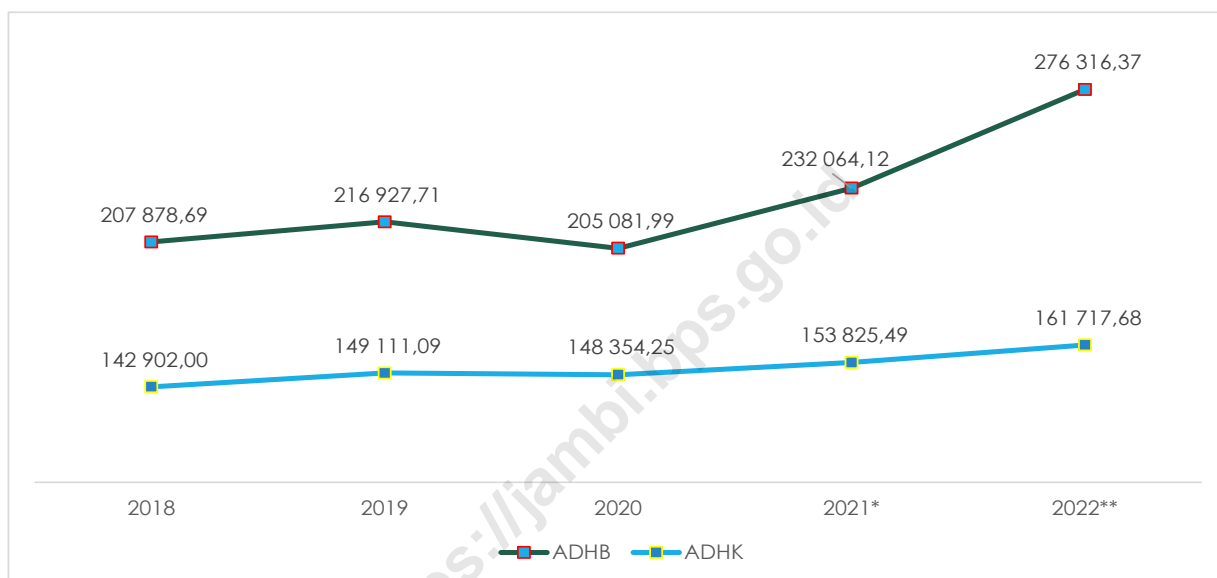
Sumber : BPS Provinsi Jambi

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi menunjukkan tren kenaikan. Namun, pandemi Covid-19 tahun 2020 mempengaruhi perekonomian nasional dan berimbas pada perekonomian Provinsi Jambi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 216,93 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 205,08 triliun rupiah pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi Jambi kembali pulih sejak pertengahan 2021, ditandai dengan kenaikan nilai ekspor dari 101,61 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 106,33 triliun rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kondisi ekspor Provinsi Jambi semakin membaik hingga mencapai 110,87 triliun rupiah.

Selain PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga konstan mencapai 149,11 triliun, kemudian turun menjadi 148,35 triliun rupiah pada tahun 2020. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan di masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Merebaknya virus corona sejak awal tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jambi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 3.2 diatas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2019 kemudian menurun pada tahun 2020 dan mulai mengalami pemulihan pada tahun 2021-2022.

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas dasar harga konstan telah meniadakan pengaruh faktor harga. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2021-2022, PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi perekonomian secara umum

**Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	42,97	44,41	47,13	44,32	41,40
2. Konsumsi LNPRRT	0,54	0,59	0,62	0,57	0,54
3. Konsumsi Pemerintah	8,16	8,41	8,72	7,90	6,86
4. PMTB	20,78	21,14	22,60	22,22	20,14
5. Perubahan Inventori	0,28	0,75	0,76	1,19	0,77
6. Ekspor	74,45	73,16	66,23	66,33	67,97
7. Impor	47,18	48,46	46,05	42,53	37,67
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Komponen penyusun PDRB pengeluaran terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor, dan impor.

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, nilai tambah yang dihasilkan di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen). Besarnya andil komponen konsumsi rumah tangga cukup membantu perekonomian Provinsi Jambi untuk bertahan pada era pandemi Covid-19, walaupun mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) pada tahun 2020.

Sementara komponen kedua yaitu PKLNPRRT memberikan andil kurang dari satu persen. Kemudian, komponen PKP memberikan andil berkisar pada angka tujuh hingga delapan persen. Sebagai komponen pengungkit investasi, PMTB Provinsi Jambi bisa menyumbang hingga 20 persen lebih. Sedangkan komponen ekspor menyumbang sebesar 66 hingga 74 persen.

Pada tahun 2022, PKRT mendominasi dengan andil sebesar 41,40 persen. Kemudian diikuti oleh komponen ekspor sebesar 67,97 persen (terkoreksi oleh impor sebesar 37,67 persen). Komponen ketiga terbesar yang memberikan andil terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah PMTB sebesar 20,14 persen. Sedangkan komponen PKP, perubahan inventori, dan PKLNPRRT masing-masing memberikan andil sebesar 6,86 persen, 0,77 persen, dan 0,54 persen.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,19	4,14	(0,44)	3,41	4,46
2. Konsumsi LNPRT	14,41	7,61	(0,75)	1,94	6,05
3. Konsumsi Pemerintah	4,98	7,58	(5,24)	0,04	1,52
4. PMTB	2,16	3,63	1,04	9,27	2,38
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	8,10	3,32	(9,52)	4,65	4,27
7. Impor	7,94	3,88	(14,69)	8,53	0,40
Total PDRB	4,69	4,35	(0,51)	3,69	5,13

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,13 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-0,51 persen). Kontraksi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Jambi tahun 2020 disebabkan banyak komponen penyusun PDRB pengeluaran yang terkena imbas pandemi Covid-19. Tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai dirasakan, hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,66 persen. Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2018-2022 mencapai 3,47 persen per tahun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menggenjot perekonomian setelah terpuruk oleh pandemi Covid-19. Perekonomian Provinsi Jambi berkontraksi hingga mencapai 0,51 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2022 perekonomian berhasil tumbuh impresif mencapai 5,13 persen. Komponen dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah komponen PKLNPRRT yang tumbuh cukup signifikan sebesar 6,05 persen. Komponen selanjutnya adalah komponen PKRT yang tumbuh sebesar 4,46 persen dimana pertumbuhan tersebut adalah capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

**Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	142,50	147,59	148,71	153,05	162,94
2. Konsumsi LNPRT	143,19	150,37	151,97	155,55	164,36
3. Konsumsi Pemerintah	157,96	157,89	163,26	167,35	170,41
4. PMTB	140,38	143,77	143,84	146,41	154,31
5. Ekspor	142,38	141,32	133,67	144,77	169,40
6. Impor	137,80	142,17	149,74	144,19	151,47
Total PDRB	145,47	145,48	138,24	150,86	170,86

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Pada tabel 3.5 disajikan indeks implisit komponen PDRB menurut pengeluaran. Indeks implisit PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Selama periode 2018-2022, indeks implisit tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 170,86. Pada tahun tersebut, indeks implisit tertinggi terjadi pada komponen PKP yaitu sebesar 170,41 sedangkan komponen dengan indeks terendah adalah impor sebesar 151,47.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama pandemi Covid-19, masyarakat Provinsi Jambi cenderung untuk menahan konsumsinya. Setelah masa pemulihan tahun 2021-2022, kondisi perekonomian yang semakin membaik mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

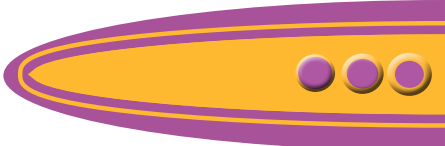
Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi rumah tangga					
a. ADHB (Milliar Rp)	89 324,49	96 343,53	96 651,04	102 858,40	114 393,37
b. ADHK (Milliar Rp)	62 685,31	65 279,81	64 991,05	67 206,01	70 205,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	42,97	44,41	47,13	44,32	41,40
Rata-rata konsumsi per rumah tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	100 522,73	108 567,59	109 735,45	115 273,86	126 597,35
b. ADHK 2010	70 543,90	73 562,51	73 789,40	75 318,07	77 695,74
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	25 018,96	27 015,76	27 314,32	28 690,37	31 503,47
b. ADHK 2010	17 557,57	18 305,16	18 366,97	18 745,82	19 334,41
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi rumah tangga	4,19	4,14	(0,44)	3,41	4,46
b. Per rumah tangga	2,59	4,28	0,31	2,07	3,16
c. Per kapita	2,57	4,26	0,34	2,06	3,14
Jumlah penduduk (000 orang)	3 570,27	3 566,20	3 538,48	3 585,12	3 631,14

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Selama lima tahun terakhir konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal (atas dasar harga berlaku) sedangkan secara riil (atas dasar harga konstan) sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga di Provinsi Jambi. Karena kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Porsi PKRT terhadap PDRB pada periode 2018-2022 cukup berfluktuatif. Titik terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 41,40 persen dan titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 47,13 persen. Meningkatnya porsi konsumsi rumah tangga dalam PDRB disebabkan karena ada porsi komponen lain yang mengalami penurunan (Tabel 3.3). Pada tahun 2022, porsi PKRT sedikit menurun dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, kinerja perdagangan Provinsi Jambi meningkat dimana proporsi ekspor mengalami peningkatan sedangkan proporsi impor sebagai faktor pengurang PDRB menurut pengeluaran mengalami penurunan.

Pada tahun 2018 secara umum setiap rumah tangga di Jambi menghabiskan dana sekitar 100,54 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan lain-lain). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 106,83 juta rupiah (2019); 109,74 juta rupiah (2020); 115,28 juta rupiah (2021); dan menjadi 126,60 juta rupiah (2022).

Secara total, pertumbuhan komponen PKRT atas dasar harga konstan sebesar 4,19 persen pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun berikutnya melambat sebesar 4,14 persen. Akhir tahun 2020, pertumbuhannya terkontraksi sebesar 0,44 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar konstan mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 3,41 persen dan 4,46 persen. Meningkatnya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dan HBA (Harga Batubara Acuan) yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi berdampak positif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Provinsi Jambi.

Berdasarkan harga konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh 2,48 persen selama 2018-2022 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,16 persen. Pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga per rumah tangga mengalami perlambatan hingga 0,31 persen. Kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021 dengan pertumbuhan konsumsi per rumah tangga mencapai 2,07 persen.

Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” pada tahun 2022 sebesar 3,16 persen per tahun dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen. Uraian di atas mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 3.7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	44,20	44,62	45,42	45,65	46,32
Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	3,33	3,27	3,16	3,01	2,98
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16,08	15,81	15,83	15,46	15,22
Kesehatan dan Pendidikan	12,15	12,64	13,27	12,97	12,03
Transportasi dan Komunikasi	21,75	21,26	19,91	20,49	20,91
Restoran dan Hotel	0,86	0,84	0,83	0,83	0,87
Lainnya	1,63	1,56	1,58	1,58	1,68
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Secara rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan 2022, terlihat bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,20 persen (2018); 44,62 persen (2019); 45,42 persen (2020); 45,65 persen (2021), dan 46,32 persen (2022).

Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,56	4,08	0,93	1,99	3,95
Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,25	2,05	(4,12)	1,07	9,15
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3,60	4,51	1,16	2,81	4,94
Kesehatan dan Pendidikan	5,09	6,94	5,29	3,06	2,47
Transportasi dan Komunikasi	4,07	3,23	(6,30)	7,24	5,14
Restoran dan Hotel	2,24	2,35	(6,00)	5,20	10,20
Lainnya	0,77	(0,31)	(1,96)	2,10	8,11
Total Konsumsi	4,19	4,14	(0,44)	3,41	4,46

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok menunjukkan fluktuasi selama periode 2018-2022, dengan rincian masing-masing sebesar 4,19 persen (2018); 4,14 persen (2019); minus 0,44 persen (2020); 3,41 persen (2021) dan 4,46 persen (2022). Pertumbuhan “riil” menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Laju pertumbuhan riil tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada kelompok restoran dan hotel (10,20 persen) disusul kelompok pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya dengan laju 9,15 persen dan posisi ketiga adalah kelompok konsumsi lainnya (8,11 persen). Pada tahun 2022, perekonomian Provinsi Jambi kembali menggeliat. Setelah pemerintah melakukan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran dan aktivitas sosial lainnya, pengeluaran konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan terutama di ketiga kategori tersebut.

**Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)**

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2,47	4,63	1,18	4,86	8,57
Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,28	3,87	0,84	0,53	0,81
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2,90	1,48	(0,70)	1,08	4,32
Kesehatan dan Pendidikan	3,72	4,96	0,04	0,93	0,61
Transportasi dan Komunikasi	3,68	2,10	0,27	2,16	7,94
Restoran dan Hotel	2,46	3,06	5,13	1,41	4,79
Lainnya	2,41	2,98	3,82	4,57	9,19

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9, menunjukkan perubahan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan dan minuman, selain restoran sebesar 2,47 persen (2018); 4,63 persen (2019); 1,18 persen (2020); 4,86 persen (2021); dan 8,57 persen (2022).

Sementara itu, pertumbuhan implisit kelompok konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya sebesar 2,28 persen (2018) dan kembali tumbuh sebesar 3,87 persen (2019). Pada tahun berikutnya implisit kelompok konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya melambat sebesar 0,84 persen (2020), tahun 2021 lajunya semakin melandai hingga mencapai 0,53 persen. Pertumbuhan implisit kelompok konsumsi ini pada tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 0,81 persen.

Pada tahun 2022, harga kelompok lainnya mengalami inflasi hingga 9,19 persen. Sedangkan kelompok makanan dan minuman, selain restoran; kelompok transportasi dan komunikasi; dan kelompok restoran dan hotel mengalami inflasi masing-masing sebesar 8,57 persen; 7,94 persen; dan 4,79 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan Konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa peranan konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB masih relatif kecil.

**Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Jambi, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 124,74	1 270,94	1 274,91	1 330,25	1 490,60
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	785,47	845,22	838,90	855,19	906,94
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,54	0,59	0,62	0,57	0,54

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, proporsi pengeluaran konsumsi lembaga non profit cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi pengeluaran konsumsi lembaga non profit pada masing-masing tahun sebesar 0,54 persen (2018); 0,59 persen (2019); 0,62 persen (2020); 0,57 persen (2021) dan 0,54 persen (2022).

Peningkatan proporsi konsumsi lembaga non profit pada tahun 2020 didorong oleh adanya pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2020 di Provinsi Jambi. Selain pemilihan gubernur Provinsi Jambi, ada 5 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Biaya kampanye, pemasangan spanduk, baliho dan sosialisasi untuk kemenangan calon pasangan pada partai tertentu membuat pengeluaran lembaga non profit meningkat.

Proporsi komponen LNPRT tahun 2021 dan 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun-tahun tersebut tidak ada pesta demokrasi yang besar. Meskipun proporsinya menurun, akan tetapi aktivitas LNPRT pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tajam disebabkan oleh meningkatnya aktivitas partai politik.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Total konsumsi akhir mencakup konsumsi akhir pemerintah, rumah tangga, dan LNPRT. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Jambi serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	16 968,27	18 246,78	17 878,52	18 332,42	18 953,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	10 742,18	11 556,81	10 950,82	10 954,81	11 121,82
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,16	8,41	8,72	7,90	6,86
Konsumsi pemerintah perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4 752,65	5 116,59	5 052,61	5 113,48	5 219,59
b. ADHK 2010	3 008,78	3 240,65	3 094,78	3 055,63	3 062,90
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	4,98	7,58	(5,24)	0,04	1,52
b. Konsumsi per kapita	3,36	7,71	(4,50)	(1,27)	0,24
Jumlah penduduk (000 org)	3 570,27	3 566,20	3 538,48	3 585,12	3 631,14

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 16,97 triliun rupiah, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 18,25 triliun rupiah.

Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami penurunan menjadi 17,88 triliun rupiah. Demikian halnya dengan pengeluaran pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 namun menurun pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terdapat belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 tetapi proporsinya tidak terlalu signifikan mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah secara total.



Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berkisar pada angka 6,86 persen hingga 8,72 persen. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4,75 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 3.11).

Selama periode 2018-2022 konsumsi pemerintah per kapita ADHK berfluktuasi. Selama lima tahun terakhir, rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK mencapai 3,09 juta rupiah. Indikasi perlambatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas mulai terlihat pada tahun 2020. Hal itu juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang berkontraksi hingga 4,50 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan konsumsi per kapita masih berkontraksi sebesar 1,27 persen dan kembali tumbuh positif di tahun 2022 sebesar 0,24 persen.

Selain laju pertumbuhan konsumsi per kapita, parameter laju total konsumsi pemerintah juga dapat digunakan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Lebih dari 57 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019. Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah cenderung stabil. Pada tahun 2018 proporsinya 60,54 persen dan sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi menjadi 60,74 persen. Strukturnya berubah dan terus mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 59,65 persen dan 57,46 persen. Pada tahun 2022, struktur konsumsi kolektif pemerintah kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan proporsi sebesar 60,84 persen.

Tabel 3.12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
Konsumsi Kolektif	60,54	60,74	59,65	57,46	60,84
Konsumsi Individu	39,46	39,26	40,35	42,54	39,16
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK 2010)					
a. Konsumsi Kolektif	7,06	8,51	(5,86)	(4,55)	6,72
b. Konsumsi Individu	1,97	6,17	(4,28)	7,06	(5,57)
Total Konsumsi	4,98	7,58	(5,24)	0,04	1,52
Pertumbuhan indeks harga implisit					
a. Konsumsi Kolektif	1,46	(0,58)	2,22	3,47	2,58
b. Konsumsi Individu	1,35	0,78	5,20	0,99	0,77
Total Konsumsi	1,42	(0,05)	3,40	2,50	1,83

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2018-2022 cenderung stabil. Pada tahun 2018 proporsinya mencapai 39,46 persen dan sedikit mengalami penurunan menjadi 39,26 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsinya kembali meningkat menjadi 40,35 persen. Pada tahun 2021, konsumsi individu mengalami kenaikan hingga 42,54 persen akan tetapi kembali menurun menjadi 39,16 persen pada tahun 2022.



3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

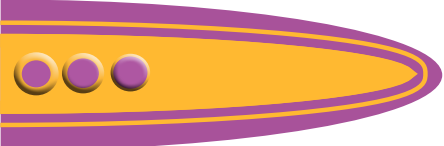
Selain perubahan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan perubahan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.13 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi. Laju pertumbuhan PMTB tahun 2018 sebesar 2,16 persen, kemudian naik menjadi 3,63 persen pada tahun 2019. Menjelang akhir tahun 2020 pertumbuhan melambat sebesar 1,04 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan mencapai hingga 9,27 persen dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi bagi komponen PMTB selama lima tahun terakhir. Komponen PMTB merupakan satu-satunya komponen yang bisa tumbuh tinggi di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan komponen ini kembali melambat sebesar 2,38 persen.

Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	43 204,87	45 855,12	46 354,76	51 559,91	55 636,55
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	30 777,99	31 894,30	32 226,99	35 215,52	36 054,53
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	20,78	21,14	22,60	22,22	20,14
Struktur PMTB (%)					
Bangunan	72,25	72,89	72,61	74,10	72,43
Non Bangunan	27,75	27,11	27,39	25,90	27,57
Total PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
Bangunan	2,58	3,70	0,70	9,47	(0,93)
Non Bangunan	1,05	3,43	1,96	8,76	11,19
Total PMTB	2,16	3,63	1,04	9,27	2,38

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi



Pertumbuhan PMTB pada masing-masing sub komponen sangat bervariasi. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung melambat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2018-2022 (tabel 3.13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2018 sebesar 2,58 persen dan pada tahun 2019 kembali menguat menjadi 3,70 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan sub komponen ini melambat sebesar 0,70 persen dan pada tahun 2021 tumbuh sangat signifikan sebesar 9,47 persen. Sub komponen ini mengalami kontraksi sebesar 0,93 persen pada tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan non bangunan mencapai 1,05 persen dan membaik pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 3,43 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan komponen ini melambat sebesar 1,96 persen dan pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 8,76 persen. Berbeda dengan sub komponen bangunan, komponen non bangunan pada tahun 2022 justru mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir dengan pertumbuhan sebesar 11,19 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan posisi persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan posisi persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini mengindikasikan perekonomian pada tahun tersebut berjalan kurang bagus. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	583,48	1 627,91	1 553,19	2 759,71	2 139,07
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	399,69	1 177,08	814,98	1 720,56	1 286,55
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	0,28	0,75	0,76	1,19	0,77

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji secara rinci. Komponen ini dalam PDRB nilainya berfluktuasi. Inventori terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 583,48 miliar rupiah dan penambahan inventori terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu 2,76 triliun rupiah.

Jika dilihat dari proporsinya, komponen inventori memberikan andil yang relatif kecil terhadap PDRB pengeluaran Provinsi Jambi. Selama periode 2018-2022, proporsi komponen ini masih di bawah dua persen. Pada tahun 2018, proporsinya sebesar 0,28 persen dan meningkat di tahun 2019 menjadi 0,75 persen. Kemudian pada tahun 2020, proporsinya relatif stabil sebesar 0,76 persen. Pada tahun 2021, proporsi komponen ini meningkat menjadi 1,19 persen dan kemabali turun di tahun 2022 menjadi 0,77 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR PROVINSI JAMBI

Perkembangan ekspor Provinsi Jambi berkaitan erat dengan kondisi pasar internasional, karena proses ekspor merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari perdagangan luar negeri. Provinsi Jambi berperan aktif di dalam penjualan komoditi andalan regional berupa hasil tambang dan perkebunan. Ekspor bukan hanya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, namun aktivitas perdagangan ini diharapkan juga memberikan rangsangan untuk menumbuhkan permintaan dalam negeri sehingga industri akan terus meningkatkan output. Dalam konteks regional, konsep ekspor mencakup perdagangan dengan luar negeri dan antar provinsi.

**Tabel 3.15 Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi,
2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	154 755,93	158 700,84	135 816,76	153 928,09	187 805,73
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	108 691,61	112 297,08	101 607,31	106 328,78	110 868,20
c. Laju Pertumbuhan (Persen)	8,10	3,32	(9,52)	4,65	4,27
d. Indeks Implisit Ekspor	142,38	141,32	133,67	144,77	169,40

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Komponen ekspor Provinsi Jambi selama periode 2018-2022 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2019 angka ekspor atas dasar harga berlaku meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun tersebut, nilai ekspor sebesar 158,70 triliun rupiah dan pada tahun sebelumnya sebesar 154,76 persen. Tahun 2020 nilai ekspor mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga sebesar 135,82 triliun rupiah. Turunnya permintaan dari negara lain selama pandemi Covid-19 terutama negara tujuan utama ekspor Provinsi Jambi (Cina, India, Singapura) membuat nilai ekspor menurun. Namun, secara perlahan-lahan nilai ekspor kembali membaik pada tahun 2021, dari sisi atas dasar harga berlaku, nilainya mencapai 153,93 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 2022 nilai ekspor mencapai 187,81 triliun rupiah yang merupakan nilai ekspor tertinggi selama lima tahun terakhir.

Nilai ekspor ke luar negeri atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Nilai riil ekspor tahun 2018 adalah 108,69 triliun rupiah meningkat menjadi 112,30 triliun rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai ekspor menurun tajam hingga 101,61 triliun rupiah. Pandemi Covid-19 membuat kinerja ekspor Provinsi Jambi menurun. Pembatasan komoditi dan penurunan permintaan luar negeri membuat beberapa barang ekspor primadona Provinsi Jambi seperti kelapa sawit, karet dan hasil pertambangan menurun. Akan tetapi hal tersebut cepat teratasi, sebelum pandemi Covid-19 berakhir harga komoditi ekspor andalan Provinsi Jambi mengalami perbaikan dan mendorong peningkatan aktivitas ekspor. Pada tahun 2022, kinerja ekspor semakin membaik dengan nilai ekspor atas dasar harga konstan 2010 sebesar 110,87 triliun rupiah.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka positif, baik pada tahun 2018 maupun 2019. Pertumbuhan positif tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor migas. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2020 (minus 9,52 persen). Pertumbuhan minus tersebut didorong oleh beberapa peraturan yang membatasi beberapa komoditi ekspor yang dilakukan oleh kementerian perdagangan demi mengurangi penyebaran virus corona. Pada tahun 2021 dan 2022, ketika pemulihan ekonomi dilakukan maka kinerja ekspor juga semakin membaik dan kembali tumbuh positif.

Jika dilihat perkembangan dari indeks implisit, maka indeks implisit ekspor terendah pada tahun 2020 mencapai 133,67 dan tertinggi tahun 2022 mencapai hingga 169,40. Indeks implisit tahun 2018, 2019, dan 2021 masing-masing sebesar 142,38; 141,32; dan 144,77.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR PROVINSI JAMBI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun investasi (PMTB dan perubahan inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jambi. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB menurut pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen.

Tabel 3.16 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2019 cenderung menaik (atas dasar harga berlaku), kemudian pada tahun 2020 turun hingga lebih dari 10 persen. Pada tahun 2018 nilai impor mencapai 98,08 triliun rupiah, bertambah hingga 105,12 triliun rupiah pada 2019. Akhir tahun 2020 impor turun cukup signifikan menjadi 94,45 triliun rupiah dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98,70 triliun rupiah. Pada tahun 2022 nilai impor meningkat cukup signifikan mencapai 104,10 triliun rupiah.

Tabel 3.16 Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	98 083,09	105 117,41	94 447,18	98 704,67	104 101,98
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	71 180,25	73 939,21	63 075,80	68 455,37	68 726,23
c. Laju Pertumbuhan (Persen)	7,94	3,88	(14,69)	8,53	0,40
d. Indeks Implisit Impor	137,80	142,17	149,74	144,19	151,47

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi



Nilai impor menurut dasar harga konstan sejalan dengan nilai impor atas dasar harga berlaku. Nilai impor mengalami peningkatan pada tahun 2019 kemudian kembali menurun pada tahun 2020. Di sisi lain, secara riil nilai impor pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 7,94 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan impor masih positif namun melambat hingga mencapai 3,88 persen pada tahun 2019. Penurunan impor terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar minus 14,69 persen, kemudian mengalami perbaikan hingga lajunya kembali tumbuh sebesar 8,53 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan impor kembali melambat pada tahun 2022 sebesar 0,40 persen.

Menurut perkembangan indeks implisitnya, impor tumbuh bagus dan cenderung naik hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 nilai indeks implisit impor sebesar 137,80 kemudian meningkat hingga mencapai 149,74 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, indeks implisit melemah dengan nilai indeks sebesar 144,19, posisi nilai impor atas dasar harga berlaku sedikit melambat dibandingkan nilai impor atas dasar harga konstannya. Indeks implisit menguat pada tahun 2022 hingga mencapai 151,47 yang merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir.

<https://jambihps.go.id>

BAB 4

PERKEMBANGAN

PDRB

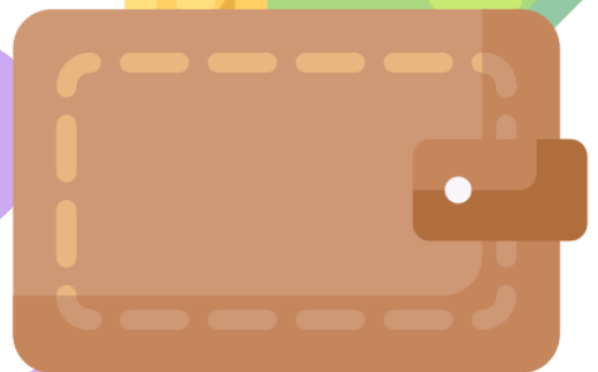


INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR berfluktuasi dengan rentang -42,58 sampai dengan 4,57. Tahun 2018 angka ICOR pada posisi 4,81 menjadi 6,44 pada 2021. Pada tahun 2022 masih positif 4,57.

Rasio Ekspor terhadap Impor

Rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2018-2022. Pada 2018 besar rasio ini 1,58, sedangkan pada 2022 sebesar 1,80



Total Konsumsi Akhir dan PDRB

Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB terkadang mengalami penurunan. Pada tahun 2022 proporsi antar keduanya sebesar 48,80



BAB 4 PERKEMBANGAN PDRB

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana didalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Miliar Rp)	207 878,69	216 927,71	205 081,99	232 064,12	276 316,37
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	142 902,00	149 111,09	148 354,25	153 825,49	161 717,68
PDRB Perkapita					
a. ADHB (Ribu Rp)	58 224,89	60 828,86	57 957,73	64 729,82	76 096,40
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	40 025,52	41 812,35	41 926,04	42 906,66	44 536,39
Pertumbuhan (%)					
PDRB Perkapita ADHK 2010	3,07	4,46	0,27	2,34	3,80
Jumlah Penduduk (000 orang)	3 570,27	3 566,20	3 538,48	3 585,12	3 631,14

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Selama periode 2018-2022 PDRB per kapita Provinsi Jambi cenderung meningkat (tabel 4.1), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Jambi rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Meskipun pada tahun 2020 PDRB per kapita sempat terpuruk, tetapi semakin membaik seiring dengan pemulihan pasca Covid-19.

Pertumbuhan per kapita secara riil berada di kisaran 2 hingga 4 persen pada tahun 2018-2019, kemudian melambat pada tahun 2020. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan membaik hingga 3,80 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 1,28 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(Miliar Rp)	89 324,49	96 343,53	96 651,04	102 858,40	114 393,37
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	154 755,93	158 700,84	135 816,76	153 928,09	187 805,73
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	0,58	0,61	0,71	0,67	0,61

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jambi (*share* tahun 2022 sebesar 41,40 persen), yang artinya bahwa seluruh nilai tambah yang dihasilkan di wilayah Jambi sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Peningkatan dan penurunan ekspor disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Sedangkan peningkatan dan penurunan konsumsi rumah tangga disebabkan harga (inflasi) dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas tampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Jambi digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(Miliar Rp)	89 324,49	96 343,53	96 651,04	102 858,40	114 393,37
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	43 204,87	45 855,12	46 354,76	51 559,91	55 636,55
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,07	2,10	2,09	1,99	2,06

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Seperti halnya dengan perbandingan terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB relatif stabil. Pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sedikit meningkat dari sebesar 2,07 pada tahun 2018 menjadi 2,10 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio tersebut sedikit menurun menjadi 2,09 dan 1,99. dan kembali meningkat menjadi 2,06 pada tahun 2022.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB terkadang mengalami penurunan. Dalam hal ini, komponen yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif besar.

Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	89 324,49	96 343,53	96 651,04	102 858,40	114 393,37
b. LNPRT	1 124,74	1 270,94	1 274,91	1 330,25	1 490,60
c. Pemerintah	16 968,27	18 246,78	17 878,52	18 332,42	18 953,03
Jumlah	107 417,50	115 861,25	115 804,47	122 521,07	134 837,00
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	207 878,69	216 927,71	205 081,99	232 064,12	276 316,37
Proporsi	51,67	53,41	56,47	52,80	48,80

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada tahun 2018-2022 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (tabel 4.5). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) diperlukan sejumlah kapital (yang didalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 cenderung naik. Peningkatan rasio tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB)(Miliar Rp)	154 755,93	158 700,84	135 816,76	153 928,09	187 805,73
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	43 204,87	45 855,12	46 354,76	51 559,91	55 636,55
Rasio Ekspor terhadap PMTB	3,58	3,46	2,93	2,99	3,38

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Rasio ekspor terhadap PMTB mencapai titik tertinggi sebesar 3,58 yang terjadi pada tahun 2018 sedangkan terendah pada tahun 2020 sebesar 2,93. Rasio ekspor terhadap PMTB perlahan merangkak naik menjadi 2,99 pada tahun 2021 dan 3,38 pada tahun 2022. Rasio yang semakin meningkat menunjukkan bahwa peningkatan ekspor lebih besar daripada peningkatan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jambi,
2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB)(Miliar Rp)	207 878,69	216 927,71	205 081,99	232 064,12	276 316,37
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	98 083,09	105 117,41	94 447,18	98 704,67	104 101,98
Rasio PDRB terhadap Impor	2,12	2,06	2,17	2,35	2,65

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Rasio PDRB terhadap impor menunjukkan penurunan dari 2,12 (2018) menjadi 2,06 (2019), kemudian tahun 2020 kembali meningkat menjadi 2,17. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana rasionya mencapai 2,65. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Meningkatnya rasio pada tahun 2022 disebabkan penurunan impor lebih besar dibandingkan penurunan PDRB.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jambi,
2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)(Miliar Rp)	207 878,69	216 927,71	205 081,99	232 064,12	276 316,37
Persentase (%)	67,94	67,36	68,47	70,16	72,63
Total Nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	98 083,09	105 117,41	94 447,18	98 704,67	104 101,98
Persentase (%)	32,06	32,64	31,53	29,84	27,37
Total Permintaan Akhir (Miliar Rp)	305 961,78	322 045,12	299 529,17	330 768,79	380 418,35
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Provinsi Jambi, dengan rentang nilai 29,84-32,64 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 67-70 persen dari produksi domestik. Tendensi permintaan (akhir) masyarakat pada tahun 2019 cenderung meningkat dari 305,96 triliun rupiah (2018) menjadi sebesar 322,05 triliun rupiah (2019). Pada tahun 2020 kecenderungan permintaan akhir menurun, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2021 dan bahkan mencapai angka tertinggi sebesar 380,42 triliun rupiah di tahun 2022.

Di sisi lain penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 207,88 triliun rupiah (2018); 216,93 triliun rupiah (2019); 205,08 triliun rupiah (2020); 232,06 triliun rupiah (2021); dan 276,32 triliun rupiah (2022). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 98,08 triliun rupiah (2018); 105,12 triliun rupiah (2019); 94,45 triliun rupiah (2020); 98,70 triliun rupiah (2021); dan 104,10 triliun rupiah (2022).



4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi ekspor dan impor yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar (*non residen*) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB)(Miliar Rp)	154 755,93	158 700,84	135 816,76	153 928,09	187 805,73
Nilai Impor (ADHB)(Miliar Rp)	98 083,09	105 117,41	94 447,18	98 704,67	104 101,98
Net Ekspor (X-M) (Miliar Rp)	56 672,84	53 583,43	41 369,58	55 223,42	83 703,75
Rasio Ekspor terhadap Impor	1,58	1,51	1,44	1,56	1,80

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Selama periode 2018-2022, perdagangan Provinsi Jambi dengan wilayah luar negeri maupun antar provinsi menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan Provinsi Jambi berada dalam posisi surplus.

Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk. Surplus perdagangan Provinsi Jambi yang terjadi kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan 2022 tercatat masing-masing sebesar 56,67 triliun rupiah (2018); 53,58 triliun rupiah (2019); 41,37 triliun rupiah (2020); 55,22 triliun rupiah (2021); dan 83,70 triliun rupiah (2022).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 rasionya sebesar 1,58 turun menjadi sekitar 1,51 pada tahun 2019. Pada Tahun 2020 rasio ekspor terhadap impor semakin turun menjadi 1,44 dan kembali menguat menjadi 1,56 pada tahun 2021. Ketika memasuki tahun 2022, rasio ekspor terhadap impor berada pada level tertinggi dengan angka mencapai 1,80.

4.9 *INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)*

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formulasnya:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

I_t = PMTB tahun ke-t

Y_t = Output tahun ke-t

Y_{t-1} = Output tahun ke-t-1

Tabel 4.9 Incremental Capital Output Ratio Provinsi Jambi, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	142 902,00	149 111,09	148 354,25	153 825,49	161 717,68
Perubahan PDRB ADHK (Milliar Rp)	6 400,29	6 209,09	(756,83)	5 471,24	7 892,19
PMTB (ADHK 2010) (Milliar Rp)	30 777,99	31 894,30	32 226,99	35 215,52	36 054,53
ICOR	4,81	5,14	(42,58)	6,44	4,57

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

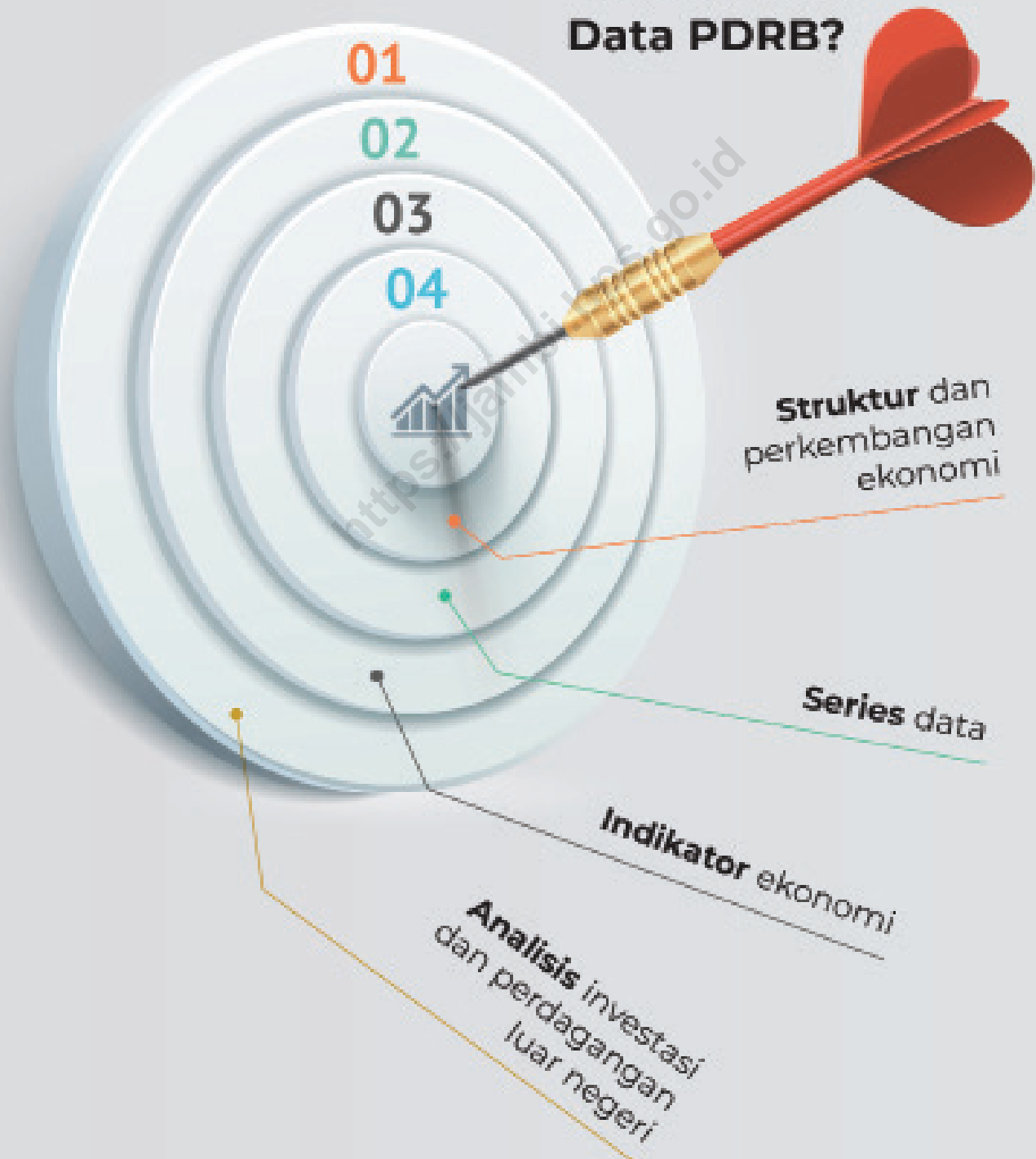
Sumber : BPS Provinsi Jambi

Tabel 4.9 menunjukkan besaran ICOR berfluktuasi dengan rentang minus 42,58 sampai dengan 6,44. Pada periode 2018-2019 (periode sebelum Covid-19), investasi dalam kondisi yang kondusif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ICOR tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 4,81 dan 5,14. Sedangkan ketika pandemi Covid-19 melanda angka ICOR mencapai minus 42,58 (tahun 2020). Artinya investasi yang telah dilakukan ketika pandemi Covid-19 melanda belum bisa menghasilkan output secara optimal. Namun, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 membawa titik terang terhadap perubahan kegiatan investasi, hal tersebut dapat diamati dari nilai ICOR tahun 2021 yang pelan-pelan membaik (6,44). Pada tahun 2022, nilai ICOR mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 akan tetapi masih bertanda positif dengan nilai 4,57.

BAB 5

KESIMPULAN

Apa yang Kita
Peroleh dari
Data PDRB?



BAB 5 KESIMPULAN

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan kegiatan ekspor impor. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran antara lain distribusi, laju pertumbuhan dan indeks implisit.
3. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2018 mencapai 4,69 persen. Namun, pada tahun 2020 pandemi Covid-19 mempengaruhi PDRB Provinsi Jambi sehingga laju pertumbuhan PDRB berkontraksi hingga 0,51 persen. Pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan pada tahun 2021, membawa sedikit perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Pada tahun 2022, perekonomian Provinsi Jambi berhasil tumbuh impresif sebesar 5,13 persen yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir.
4. Pada tahun 2022, komponen PKRT masih mendominasi distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran (41,40 persen)..
5. Komponen PKLNPRT pada tahun 2022 mencapai pertumbuhan tertinggi dengan laju sebesar 6,05 persen. Hal ini dikarenakan pemerintah telah melonggarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga aktivitas sosial masyarakat meningkat serta mulai meningkatnya aktivitas partai politik.
6. Selama periode 2018-2022, net ekspor Provinsi Jambi (luar negeri dan antar provinsi) bernilai positif yang menunjukkan neraca perdagangan Provinsi Jambi selalu berada dalam posisi surplus.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jambi.lpp.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Tabel Input Output Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
- Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990, Jakarta.
- Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.
- Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997, Jakarta 2000.
- Profil Ekonomi Rumah tangga 1998, Jakarta 1999.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper*, Series No.4, Jakarta 1988.
- United Nations, *A System of National Accounts, Studies in Methods*, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
- Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods*, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
- Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
- Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No.76, New York, 2000.
- Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
- Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
- World Bank, *System of National Accounts* 1993, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<https://lampiran.bps.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	89 324 493,96	96 343 529,88	96 651 035,77	102 858 403,04	114 393 369,89
a) Makanan dan Minuman, Selain Restoran	39 477 268,79	42 989 742,32	43 901 664,74	46 950 016,14	52 986 603,91
b) Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2 975 522,97	3 154 148,88	3 049 389,52	3 098 614,44	3 409 293,26
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	14 360 802,64	15 230 969,28	15 300 975,68	15 901 228,71	17 406 160,81
d) Kesehatan dan Pendidikan	10 850 447,13	12 178 570,25	12 828 943,23	13 344 116,48	13 756 223,14
e) Transportasi dan Komunikasi	19 429 427,03	20 477 884,61	19 240 688,32	21 078 140,77	23 922 273,51
f) Restoran dan Hotel	771 626,60	813 972,81	804 415,02	858 119,67	990 929,01
g) Lainnya	1 459 398,80	1 498 241,74	1 524 959,24	1 628 166,81	1 921 886,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1 124 742,98	1 270 940,47	1 274 912,26	1 330 253,17	1 490 604,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16 968 265,43	18 246 783,75	17 878 520,93	18 332 423,33	18 953 025,13
a) Konsumsi Kolektif	10 272 817,87	11 082 990,36	10 665 295,99	10 533 257,40	11 531 772,51
b) Konsumsi Individu	6 695 447,57	7 163 793,40	7 213 224,94	7 799 165,92	7 421 252,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43 204 874,07	45 855 119,48	46 354 758,82	51 559 906,12	55 636 551,31
a) Bangunan	31 214 280,51	33 421 749,70	33 658 193,86	38 203 759,48	40 296 705,85
b) Non Bangunan	11 990 593,56	12 433 369,78	12 696 564,95	13 356 146,63	15 339 845,46
5. Perubahan Inventori	583 475,99	1 627 910,46	1 553 185,81	2 759 707,67	2 139 069,82
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	56 672 841,89	53 583 424,19	41 369 578,84	55 223 427,88	83 703 748,20
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	44 324 882,39	40 730 572,08	26 637 805,94	38 844 955,46	45 197 285,61
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1 631 206,00	1 535 187,50	1 366 322,76	640 874,55	911 165,51
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	13 979 165,49	14 388 039,61	16 098 095,67	17 019 346,97	39 417 628,10
PDRB	207 878 694,32	216 927 708,24	205 081 992,42	232 064 121,21	276 316 369,16

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62 685 308,30	65 279 813,80	64 991 049,83	67 206 008,33	70 205 869,03
a) Makanan dan Minuman, Selain Restoran	26 583 316,37	27 666 624,82	27 923 200,61	28 478 061,66	29 602 473,74
b) Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2 372 201,35	2 420 902,37	2 321 055,50	2 345 991,94	2 560 587,44
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9 393 311,13	9 816 790,86	9 930 971,54	10 210 442,76	10 714 428,16
d) Kesehatan dan Pendidikan	7 987 088,11	8 541 256,71	8 993 402,12	9 268 587,96	9 497 288,93
e) Transportasi dan Komunikasi	14 742 987,95	15 218 901,68	14 260 416,63	15 292 479,66	16 079 020,11
f) Restoran dan Hotel	523 786,98	536 101,10	503 942,28	530 129,80	584 186,45
g) Lainnya	1 082 616,41	1 079 236,26	1 058 061,16	1 080 314,54	1 167 884,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	785 468,75	845 220,60	838 902,20	855 185,45	906 936,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10 742 178,89	11 556 813,61	10 950 816,01	10 954 810,72	11 121 821,98
a) Konsumsi Kolektif	6 485 492,28	7 037 519,35	6 625 127,65	6 323 634,11	6 748 675,39
b) Konsumsi Individu	4 256 686,61	4 519 294,25	4 325 688,36	4 631 176,61	4 373 146,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30 777 991,49	31 894 295,76	32 226 990,00	35 215 517,75	36 054 526,19
a) Bangunan	22 388 864,18	23 217 345,30	23 379 782,14	25 593 265,87	25 355 538,47
b) Non Bangunan	8 389 127,31	8 676 950,47	8 847 207,85	9 622 251,88	10 698 987,72
5. Perubahan Inventori	399 693,44	1 177 075,46	814 980,76	1 720 559,49	1 286 551,22
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	37 511 354,94	38 357 869,12	38 531 516,09	37 873 411,28	42 141 975,76
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	39 280 036,63	39 266 737,13	28 168 655,46	34 748 487,48	32 579 866,17
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1 069 062,43	1 015 606,12	959 510,02	440 147,52	527 166,80
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	(699 619,27)	106 738,11	11 322 370,66	3 565 071,32	10 089 276,40
PDRB	142 901 995,81	149 111 088,36	148 354 254,90	153 825 493,02	161 717 680,44

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	42,97	44,41	47,13	44,32	41,40
a) Makanan dan Minuman, Selain Restoran	18,99	19,82	21,41	20,23	19,18
b) Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	1,43	1,45	1,49	1,34	1,23
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	6,91	7,02	7,46	6,85	6,30
d) Kesehatan dan Pendidikan	5,22	5,61	6,26	5,75	4,98
e) Transportasi dan Komunikasi	9,35	9,44	9,38	9,08	8,66
f) Restoran dan Hotel	0,37	0,38	0,39	0,37	0,36
g) Lainnya	0,70	0,69	0,74	0,70	0,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,54	0,59	0,62	0,57	0,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,16	8,41	8,72	7,90	6,86
a) Konsumsi Kolektif	4,94	5,11	5,20	4,54	4,17
b) Konsumsi Individu	3,22	3,30	3,52	3,36	2,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,78	21,14	22,60	22,22	20,14
a) Bangunan	15,02	15,41	16,41	16,46	14,58
b) Non Bangunan	5,77	5,73	6,19	5,76	5,55
5. Perubahan Inventori	0,28	0,75	0,76	1,19	0,77
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	27,26	24,70	20,17	23,80	30,29
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	21,32	18,78	12,99	16,74	16,36
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	0,78	0,71	0,67	0,28	0,33
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	6,72	6,63	7,85	7,33	14,27
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,19	4,14	(0,44)	3,41	4,46
a) Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,56	4,08	0,93	1,99	3,95
b) Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,25	2,05	(4,12)	1,07	9,15
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3,60	4,51	1,16	2,81	4,94
d) Kesehatan dan Pendidikan	5,09	6,94	5,29	3,06	2,47
e) Transportasi dan Komunikasi	4,07	3,23	(6,30)	7,24	5,14
f) Restoran dan Hotel	2,24	2,35	(6,00)	5,20	10,20
g) Lainnya	0,77	(0,31)	(1,96)	2,10	8,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14,41	7,61	(0,75)	1,94	6,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,98	7,58	(5,24)	0,04	1,52
a) Konsumsi Kolektif	7,06	8,51	(5,86)	(4,55)	6,72
b) Konsumsi Individu	1,97	6,17	(4,28)	7,06	(5,57)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,16	3,63	1,04	9,27	2,38
a) Bangunan	2,58	3,70	0,70	9,47	(0,93)
b) Non Bangunan	1,05	3,43	1,96	8,76	11,19
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	12,56	(0,03)	(28,26)	23,36	(6,24)
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	15,41	(5,00)	(5,52)	(54,13)	19,77
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	4,69	4,35	(0,51)	3,69	5,13

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	142,50	147,59	148,71	153,05	162,94
a) Makanan dan Minuman, Selain Restoran	148,50	155,38	157,22	164,86	178,99
b) Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	125,43	130,29	131,38	132,08	133,14
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	152,88	155,15	154,07	155,73	162,46
d) Kesehatan dan Pendidikan	135,85	142,59	142,65	143,97	144,84
e) Transportasi dan Komunikasi	131,79	134,56	134,92	137,83	148,78
f) Restoran dan Hotel	147,32	151,83	159,62	161,87	169,63
g) Lainnya	134,80	138,82	144,13	150,71	164,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	143,19	150,37	151,97	155,55	164,36
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	157,96	157,89	163,26	167,35	170,41
a) Konsumsi Kolektif	158,40	157,48	160,98	166,57	170,87
b) Konsumsi Individu	157,29	158,52	166,75	168,41	169,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	140,38	143,77	143,84	146,41	154,31
a) Bangunan	139,42	143,95	143,96	149,27	158,93
b) Non Bangunan	142,93	143,29	143,51	138,80	143,38
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	112,84	103,73	94,57	111,79	138,73
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	152,58	151,16	142,40	145,60	172,84
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	145,47	145,48	138,24	150,86	170,86

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Lampiran 6. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,95	3,57	0,76	2,92	6,46
a) Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2,47	4,63	1,18	4,86	8,57
b) Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,28	3,87	0,84	0,53	0,81
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2,90	1,48	(0,70)	1,08	4,32
d) Kesehatan dan Pendidikan	3,72	4,96	0,04	0,93	0,61
e) Transportasi dan Komunikasi	3,68	2,10	0,27	2,16	7,94
f) Restoran dan Hotel	2,46	3,06	5,13	1,41	4,79
g) Lainnya	2,41	2,98	3,82	4,57	9,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,42	5,01	1,07	2,35	5,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,07	(0,05)	3,40	2,50	1,83
a) Konsumsi Kolektif	1,46	(0,58)	2,22	3,47	2,58
b) Konsumsi Individu	1,35	0,78	5,20	0,99	0,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,82	2,42	0,05	1,79	5,40
a) Bangunan	3,27	3,25	0,01	3,69	6,47
b) Non Bangunan	1,70	0,25	0,15	(3,28)	3,29
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	13,57	(8,08)	(8,83)	18,21	24,10
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	25,13	(0,93)	(5,80)	2,25	18,71
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	4,63	0,01	(4,98)	9,13	13,26

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Jambi

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**
Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. 0741-60497
Homepage : <http://ljambi.bps.go.id/>
Email : bps1500@bps.go.id

ISSN 2301-4466

